

Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Polengan, Srumbung, Kabupaten Magelang Berbasis DESTANA

Yustirania Septiani¹, Nibras Anny Khabibah², Rr. Retno Sugiharti³, Andini Ayuningtyas⁴

¹Universitas Tidar, e-mail: yustirania_septiani@untidar.ac.id

²Universitas Tidar, e-mail: nibras@untidar.ac.id

³Universitas Tidar, e-mail: retno.sugiharti@untidar.ac.id

⁴Universitas Tidar, e-mail: andiniayu0108@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
25-01-2024

Direvisi:
29-01-2021

Diterima:
11-03-2024

ABSTRACT

Strengthening the Capacity of LPMD (Village Community Empowerment Institution) Polengan Village, District. This DESTANA-based Srumbung aims to socialize a method or method for dealing with disasters that might occur in the community in Polengan Village. Because Polengan Village is a collection of hamlets located at the foot of Mount Merapi to the west, approximately at a radius of 11 km from the top of the mountain. So that it becomes a region that is considered a disaster-prone area (KRB) III. The vulnerability is especially related to volcanoes, the KRB III area (red) which is an area that is often hit by hot clouds, lava flows, volcanic bomb throws, poisonous gas and rock falls (incandescence). The method used to empower the community towards disaster preparedness is by strengthening its capacity in terms of emergency response, namely a series of activities carried out immediately at the time of a disaster to deal with the adverse impacts caused (rescue and evacuation of victims, property, fulfillment of basic needs, protection, refugee management, rescue, and restoration of infrastructure and facilities). The method used in implementation is an extension method in collaboration with the Polengan village government and the District BPBD. Magelang as resource person, who fills in as Chief Executive of BPBD Kab. Magelang Edy Wasono, S.H and his staff. So that the Polengan LPBD is able to be at the forefront when disasters occur, especially regarding volcanoes, and in the future it will be able to initiate a DISASTER RESPONSE VILLAGE (DESTANA) in Polengan Village, Srumbung, Muntilan, Magelang Regency.

Keywords : LPMD, DESTANA, Emergency Response, BPBD

ABSTRAK

Penguatan Kapasitas LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Polengan Kec. Srumbung berbasis DESTANA ini bertujuan untuk mensosialisasikan suatu metode atau cara untuk menanggulangi bencana yang mungkin bisa terjadi pada masyarakat di Desa Polengan. Karena Desa Polengan merupakan kumpulan pedukuhan yang terletak di kaki Gunung Merapi sebelah barat, kira-kira berada pada radius 11 Km dari puncak gunung. Sehingga menjadi Wilayah yang termasuk kawasan rawan bencana (KRB) III,. Kerawanan terutama terkait gunung berapi, wilayah KRB III (merah) yang merupakan kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu (pijar). Adapun cara yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menuju siaga bencana adalah dengan memperkuat kapasitasnya dalam hal Tanggap darurat yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan (penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan berupa metode penyuluhan dengan menggandeng Pemerintah desa Polengan, dan BPBD Kab. Magelang sebagai Narasumber, yang mengisi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang Edy Wasono, S.H beserta jajarannya. Sehingga LPBD Polengan mampu menjadi garda terdepan Ketika terjadi bencana terutama terkait gunung berapi dan kedepan mampu menginisiasi menjadi DESA TANGGAP BENCANA (DESTANA) di Desa Polengan, Srumbung, Muntilan Kabupaten Magelang.

Kata Kunci : LPMD, DESTANA, Tanggap Darurat, BPBD

Corresponding Author : Yustirania Septiani, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah, e-mail: yustirania_septiani@untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Bencana menjadi bagian dari kehidupan yang menjadi sebuah ancaman dan mampu mempengaruhi tindakan manusia secara berkelanjutan. Dampak langsung yang diterima kepada Masyarakat dengan adanya keadaan ini adalah dampak ekonomi, dimana akan terjadi perubahan dari sisi perekonomian karena adanya kehilangan yang diakibatkan oleh bencana. Kondisi ini bisa terjadi karena perubahan alam atau non alam serta akibat adanya perilaku manusia yang mengakibatkan dampak negative misal korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ginting & Simamora, 2020). Dimana dapat digambarkan



Gambar 1. Konsep Bencana (BPBD Kab. Magelang, 2023)

Berdasarkan konsep bencana tersebut menurut UU No. 24 Th 2007 terkait manajemen penanggulangan bencana yakni



Gambar 2. Manajemen Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Th 2007)

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana. Salah satu wilayah desa dilingkup kabupaten Magelang yakni Desa Polengan memiliki potensi tinggi akibat dari letaknya berada di kaki Gunung Merapi sebelah barat. Jarak desa Polengan dengan gunung merapi hanya 11 Km. Berdasarkan peraturan pemerintah maka wilayah ini masuk ke dalam kawasan rawan bencana (KRB) III. KRB III merupakan Kawasan yang memiliki Tingkat kerawanan yang akan dianggap sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu (pijar). Kondisi ini menjadi pentingnya menyikapi peran dari masyarakat, Lembaga Masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah provinsi dalam penanganan bencana. Sehingga nantinya pihak- pihak tersebut mampu menangani bencana dengan tiga fase pencegahan yakni Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan, dan Penanganan Pasca Bencana (BNBP, 2013).

Kabupaten Magelang sudah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebelum terbentuk BPBD dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana khususnya oleh Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Bidang Penanggulangan Bencana (Monardo, 2022). Kemudian ditingkat pemerintahan desa dibentuk LPMD dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek Pembangunan terutama terkait kondisi rawan Bencana di desa Polengan(Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat penting, pelaksanaan pemberdayaan tepat dapat peningkatan kapasitas LPMD. Kondisi ini akan berpengaruh dalam persiapan menghadapi bencana alam yang bisa memberikan dampak korban jiwa. Sehingga penanganan bencana ini diharapkan mampu mengurangi dampak negative yang ditimbulkan dari bencana yang timbul. Maka dalam pengabdian ini akan membentuk kapasitas LPMD yang diharapkan sesuai amanat dari Undang-Undang yang merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sehingga pada akhirnya bisa terbentuk DESTANA yakni Desa Tangguh Bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

PESERTA PELATIHAN

Pengurus LPMD desa Polengan diarahkan untuk menjadi sebuah Lembaga yang dapat selaras dengan tugas dari pemerintah desa dalam proses kegiatan terutama perannya dalam penyelesaian kondisi bencana. LPMD ini akan menjadi Lembaga yang mampu menyelenggarakan sebuah rancangan kegiatan, dan mengaplikasikan dan Masyarakat serta menjadi bagian dalam pengaturan kegiatan Masyarakat agar dapat sesuai dengan standar kegiatan yang diharapkan. (Solikhah et al., 2020). Jumlah peserta 30 orang Pengurus LPMD Desa Polengan.



Gambar 3. Kegiatan Penguatan Kapasitas LPMD (Tim PKM, 2023)

PENYELENGGARA KEGIATAN

Kegiatan ini diselenggarakan tanggal 5 Juli 2023 oleh Tim Pengabdian Untidar yang di Ketuai oleh Yustirania Septiani dengan Anggota Nibras dan Andini. Dalam kegiatan ini juga bekerja sama dengan Pemerintah desa Polengan yakni Kepala Desa Polengan Nur Widodo, serta Sekretaris Desa Polengan Kudhori kemudian pihak BPBD Kab. Magelang sebagai Narasumber, dimana yang mengisi Kepala Pelaksana BPBD KAB. Magelang Edy Wasono, S.H beserta jajarannya.



Gambar 4. Tim Pengabdian, Pemerintah Desa, dan BPBD Kab. Magelang (Tim PKM, 2023)

TAHAPAN KEGIATAN DAN METODE

Metode Penguatan yang diberikan dalam kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

Langkah 1 (Metode Pengenalan Potensi):

kegiatan penguatan ini dimulai dengan penjelasan atau pengenalan terkait kondisi Kawasan, karakteristik kerawanan bencana yang muncul di Kawasan. Serta Upaya yang diharapkan dapat terbentuk ketika terjadi kondisi tersebut di Masyarakat. Bentuk pencegahan dan penanggulangan dari sisi LPMD desa Polengan yang dapat dioptimalkan melihat adanya potensi Masyarakat yang dimiliki.

Langkah 2 (Metode Simulasi):

LPMD dengan pihak BPBD mencoba memasukkan kondisi pencegahan dalam simulasi kecil sehingga dapat terlihat peran apa yang bisa dilakukan sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana

Langkah 3 (Tanya Jawab)

Metode terakhir adalah tanya jawab. Hal ini perlu dilakukan mengingat pentingnya kesamaan pemahaman dalam peran masing-masing pihak sehingga memiliki visi misi yang sama.

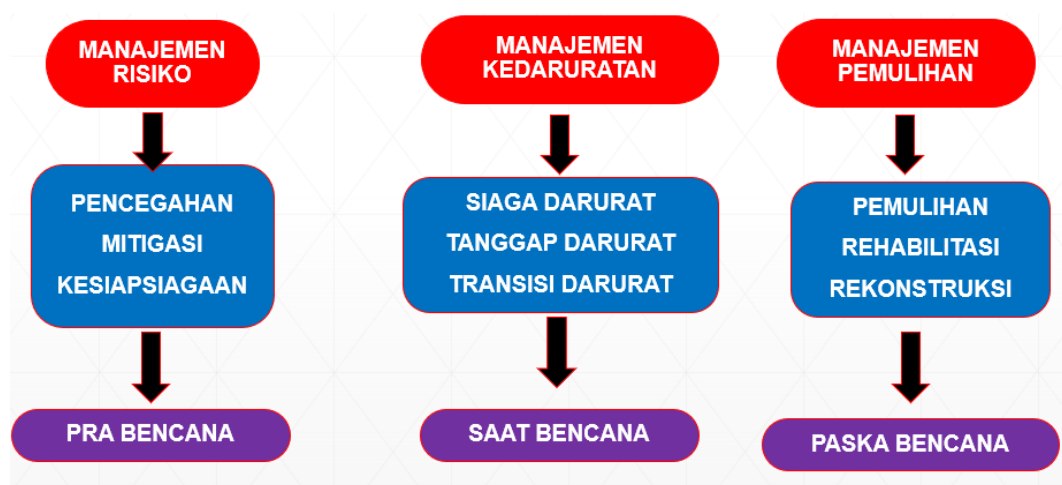
Partisipasi LPMD dalam kegiatan dapat tercermin dalam beberapa hal yakni:

1. Peserta akan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir
2. Saat sesi simulasi mini peserta dapat memposisikan diri dengan baik sesuai peran yang diberikan
3. Peserta yang belum memahami kegiatan dengan baik, mau aktif bertanya
4. Peserta mampu dan mau mengaplikasikan apa yang sudah diinformasikan secara nyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peserta memiliki pemahaman tentang konsep Tanggap Bencana.

Kondisi penyelesaian dalam bencana memiliki arti penting terkait perwujudan yang dapat mengantisipasi, dan menyelesaikan serta memperbaiki kondisi yang terjadi akibat adanya bencana. Kondisi ini bisa dikategorikan menjadi tiga tahap yakni sebelum, pada saat dan setelah bencana (IDEP, 2007). Kategorisasi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:



Gambar 5. Pola Manajemen Penanggulangan Bencana (BPBD kab. Magelang, 2023)

Kategorisasi sebelum kejadian/prabencana :

1. Kondisi untuk mampu melakukan pengorganisasian secara cepat dan tepat menjadi point utama yang menjadi perlu terbentuk. Sikap mental, budaya dan disiplin menjadi kata kunci yang penting bagi LPMD.
2. Informasi yang cepat dan akurat tentang adanya akan terjadinya bencana di masyarakat perlu diperkuat. Sehingga masyarakat bisa memposisikan diri terkait kondisi yang akan datang secara cermat.
3. Memiliki tujuan yang akan dilihat dari berbagai sudut yang mempengaruhi meminimalisasi dampak negatif yang mungkin akan timbul.

Kategorisasi yang kedua terlihat pada kondisi Kejadian Bencana, Kondisi ini bisa terjadi ketika sudah mendapatkan informasi tetapi tidak sedikit yang terjadi tanpa informasi atau terjadi dengan sangat cepat (Trirahayu, 2016):

1. Urutan proses di saat berlangsungnya bencana yang pastinya memberikan dampak negatif. Proses ini menjadi bagian penting karena akan memberikan kondisi tanggap dalam tiap anggota LPMD. Sehingga tiap pihak akan paham apa yang harus dilakukan dalam kondisi penyelamatan, pengevakasian, perlindungan serta pemulihan dalam masyarakat..
2. Pemahaman secara cepat dengan mengetahui Keputusan yang harus dilakuk saat terjadi kejadian bencana.
3. Penyelamatan Dan Evakuasi
 - a) Dampak negatif pasti akan ditimbulkan dalam setiap kejadian bencana tetapi dengan adanya peran serta LPMD akan mampu meminimalisir dampak yang diterima dalam Masyarakat.
 - b) Pemahaman pihak mana dan apa saja yang perlu didahulukan saat terjadi bencana menjadi kriteria yang akan dapat menekan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat.
 - c) Dampak negatif yang mungkin juga dapat terjadi adalah korban meninggal dunia. LPMD akan berperan bersama pemerintah desa dan pusat untuk dapat mengidentifikasi dan melakukan penguburan secara layak terhadap korban yang meninggal dunia. Serta memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, menjadi poin yang tidak bisa dipisahkan ketika terjadi bencana. Berdasarkan PP 21/2008 sudah dijelaskan bahwa, Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (bantuan penyediaan), terdiri dari beberapa aspek terkait sandang, papan dan pangan.

Kategori yang ketiga adalah pada saat setelah terjadi Bencana. Dalam kategori ini peran pemulihan menjadi yang lebih diutamakan. Manajemen pemulihan perlu dipahami bahwa setelah terjadi bencana masyarakat tetap akan melanjutkan hidup sehingga akan membentuk beberapa kondisi yakni:

1. Rehabilitasi

Proses menjadikan kondisi wilayah yang terdampak bencana dapat dinormalisasi mendekati kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Baik dari sisi sarana maupun prasarana serta layanan yang sebelumnya dimiliki oleh wilayah terdampak

2. Rekonstruksi

Pembangunan dengan tujuan memberikan penguatan dari sisi Lembaga dan keuangan agar Masyarakat terdapat bisa Kembali bangkit dari keterpurukan. Sehingga pentingnya payung hukum yang akan digunakan agar tidak terjadi perebutan hak wilayah dari tiap individu.

3. Pemulihan Segera

- a) Pemulihan layanan masyarakat dengan membangun kembali layanan yang rusak sehingga keberlangsungan kegiatan Masyarakat dapat terjaga.
- b) Pemulihan secara darurat dilakukan pada layanan vital yang sangat mendorong percepatan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat secara cepat. Misal terkait prasarana dan sarana yaitu fasilitas umum, ekonomi, dan sosial seperti jalan, jembatan, dermaga, irigasi, utilitas air minum, listrik, gas, dan jaringan komunikasi untuk menggerakkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat baik pada saat bencana maupun setelah terjadinya bencana.

B. LPBD Polengan Mampu Memperkuat Kapasitasnya dalam Hal Tanggap Darurat Berbasis DESTANA

Kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana menjadi dasar dibentuknya Tanggap Darurat yang dibekalkan pada LPMD. Sehingga akan mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat (Putra & Diatmika, 2019). Hal ini akan menjadi dasar terbentuknya DESTANA yang bertujuan:

1. Memberikan perlindungan bagi Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadi bencana.
2. Menumbuhkan pemahaman dari setiap pihak, prioritas yang harus dilakukan agar bisa memberikan dampak negative paling rendah dari berbagai sektor.
3. Terlaksananya tugas pemerintah dengan baik melalui kebijakan yang dapat diberikan untuk pengurangan risiko bencana.
4. Adanya kolaborasi antar pihak terkait tidak hanya LPMD yang peduli terkait dampak yang ditimbulkan bencana terhadap Masyarakat.

Sehingga dengan harapan akan mampu menginisiasi terbentuknya DESTANA maka yang perlu terlebih dahulu dilakukan adalah menekankan peran serta LPMD dalam penanggulangan Bencana adalah (Heryati, 2020):

1. Berkontribusi dalam segala upaya pembentukan kebijakan dalam usahanya untuk mengantisipasi, menyelesaikan dan memulihkan Masyarakat dan wilayah terdampak bencana.
2. Memberikan dukungan dengan berperan aktif ketika terjadi kondisi bencana baik sebelum, saat dan setelah bencana.
3. Ikut melakukan pemulihan secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan darurat yang muncul, sehingga dapat membentuk percepatan dalam perekonomian serta kestabilan mental masyarakat yang terkena bencana.

Sehingga pada akhirnya LPMD akan mampu menunjukkan kondisi sebagai berikut (Hidayatullah et al., 2020):

1. Pemahaman yang baik terkait kondisi dan mampu memutuskan apa yang harus dilakukan pada masa yang akan datang
2. Penekanan terkait refleksi yang terbentuk ketika terjadi kondisi bencana
3. Secara cepat dan tepat melakukan Keputusan terhadap kondisi yang sedang dihadapi
4. Berpikir kreatif tentang apa yang bisa dilakukan
5. Berdamai dengan keadaan

C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan Bencana Alam yang rentan terjadi di Desa Polengan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program ini, sangat penting sebagai batu lonjakan menuju keberlanjutan program selanjutnya. Keberhasilan ini dapat terlihat dari LPMD dalam menyiapkan diri dari bencana sehingga akan mengurangi resiko akibat bencana. Hal ini dengan cara melihat kelebihan dan kelemahan wilayah karena akan membantu dalam melihat ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi bencana, terbentuknya LPMD dalam desa menjadikan tingkat kemandirian bisa menjadi optimal dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, serta dapat meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana (PRB), pihak pemerintah daerah, pemerintahan ditingkat kecamatan dan pemerintah ditingkat desa, serta perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat yang sangat peduli terhadap bencana alam.

PENUTUP

Selama proses pelaksanaan kegiatan, Tim Pengabdian mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari semua pihak. Sehingga kegiatan ini berlangsung dan terselenggara dengan lancar. Tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang mendukung dan turut berkontribusi Pemerintah desa Polengan yakni Kepala Desa Polengan Nur Widodo, serta Sekretaris Desa Polengan Kudhori kemudian pihak BPBD Kab. Magelang sebagai Narasumber, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Magelang Edy Wasono, S.H beserta jajarannya.

Besar harapan dengan terlaksananya program ini dapat memperkuat kapasitas LPMD dalam memahami karakteristik wilayah sehingga dapat membentuk kesiapsiagaan dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menangani dampak negative yang muncul dengan adanya bencana baik dalam hal perlindungan, pengevakasian materi atau non materi, pemenuhan sarana prasarana dalam masyarakat yang terdampak. Sehingga dengan terbentuk hal tersebut nantinya akan dapat menginisiasi menjadi DESTANA yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- BNBP. (2013). Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.
- Ginting, H., & Simamora, P. (2020). Strategi komunikasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana pada kegiatan Desa Tangguh Bencana (Destana). *Social Opinion: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5(2), 123–131. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/774>
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Hidayatullah, S., Aristanto, E., Khourouh, U., Windhyastiti, I., & Graha, A. N. (2020). Pendampingan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) pada Desa Rawan Bencana Banjir Lahar Dingin Gunung Kelud di Kecamatan Kasembon. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1). <https://doi.org/10.21067/jpm.v5i1.4152>
- IDEP, Y. (2007). *Penanggulangan bencana berbasis masyarakat : berisi keterangan yang jelas untuk sebelum, saat, sesudah bencana : panduan umum*.
- Monardo, D. (2022). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 Rencana Nasional*.
- Putra, I. W. K. E., & Diatmika, I. P. G. (2019). Rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 161–166. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16531>
- Solikhah, M. M., Krisdianto, M. A., & Kusumawardani, L. H. (2020). Pengaruh Pelatihan Kader Tanggap Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(04), 156–162. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i04.800>
- Trirahayu, T. (2016). *Manajemen Bencana Erupsi Gunung Merapi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Merapi Eruption Disaster Management By Sleman Regional Disaster Management Agency*. 5(9), 1–14. <http://www.litbang>.